



Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung di Kabupaten Jember

Syaif Ali Naqie¹, Syamsul Arifin², Sri Sukmawati³

^{1,2} Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Jember, Jember.

* Corresponding author's email: alinaqie10@gmail.com

Diterima Juli 2024, Direvisi September 2024, Disetujui Oktober 2024, Terbit Oktober 2024

Abstract: This study examines public satisfaction with the Building Permit (PBG) issuance service in Jember Regency through the SIMBG application. Using a questionnaire instrument based on Permenpan No. 14 of 2017 and the E-Govqual dimension, this study involved 13 housing developer respondents as samples. The analysis results show that the Public Satisfaction Index (IKM) value is 83.12 from the Permenpan questionnaire and 79.04 from E-Govqual, both categorized as "Good." However, two E-Govqual variables were categorized as "Less Good": transaction speed and affordable internet access. Strategic recommendations include improving technological infrastructure, training system management human resources, and intensifying socialization to the community and developers. These findings provide important input for local governments to improve the quality of digital public services more inclusively and efficiently..

Keywords: Customer Satisfaction Index; Building Approval; Building Management Information System

Abstrak: Penelitian ini mengkaji tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Kabupaten Jember melalui aplikasi SIMBG. Menggunakan instrumen kuesioner berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 dan dimensi E-Govqual, penelitian ini melibatkan 13 responden developer perumahan sebagai sampel. Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,12 dari kuesioner Permenpan dan 79,04 dari E-Govqual, yang keduanya dikategorikan "Baik". Namun demikian, ditemukan dua variabel E-Govqual yang memperoleh kategori "Kurang Baik", yaitu kecepatan transaksi dan akses internet terjangkau. Rekomendasi strategis meliputi peningkatan infrastruktur teknologi, pelatihan SDM pengelola sistem, serta intensifikasi sosialisasi kepada masyarakat dan pengembang. Temuan ini memberikan masukan penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas layanan publik digital secara lebih inklusif dan efisien.

Keywords: Indeks Kepuasan Masyarakat; Persetujuan Bangunan Gedung; Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung

1. Pendahuluan

Organisasi pelayanan publik terus memberikan pelayanan yang jauh dari harapan masyarakat karena masih banyak ruang untuk perbaikan di pihak pemerintah. Hal ini ditunjukkan dengan munculnya berbagai keluhan masyarakat di media. Jika pemerintah tidak segera mengatasi masalah ini, maka hal ini berpotensi membahayakan posisi pemerintah. Mengingat tugas utama pemerintah adalah melayani masyarakat [1].

Selanjutnya dari hasil survei di Kabupaten Jember, masih ada masyarakat yang mengeluhkan salah satu pelayanan publik pemerintah, yaitu pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten Jember, hal ini dikarenakan sejak pelayanan PBG tersedia melalui aplikasi SIMBG dirasa lebih rumit dibandingkan dengan pengurusan IMB, bahkan banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya aplikasi SIMBG dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak terkait, selain itu biaya retribusi yang mahal juga menjadi masalah tersendiri bagi masyarakat, dan sanksi yang belum diterapkan dengan baik berakibat kurangnya kesadaran hukum terhadap Masyarakat serta masih ada Masyarakat yang belum mengajukan PBG sedangkan proyek pembangunannya sudah berjalan.

Semakin berkembangnya zaman juga menjadikan kebutuhan proyek pembangunan akan semakin meningkat contohnya pembangunan perumahan, rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan memiliki peran yang sangat strategis sehingga pembangunan perumahan menjadi salah satu aspek penting dalam bidang konstruksi sekarang. Maka dari itu, perumahan atau bangunan fungsi hunian menjadi fokus pada penelitian ini dikarenakan manusia

membutuhkan tempat tinggal yang aman, nyaman, dan legal secara hukum.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perlu ditetapkan sebagai standar untuk mengukur kualitas pelayanan, menilai elemen-elemen pelayanan yang masih memerlukan peningkatan dan mendorong setiap unit pelayanan untuk meningkatkan kualitas. Informasi dan data tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap penggunaan aparatur penyedia layanan untuk mendapatkan layanan, sebagaimana ditentukan oleh penilaian kuantitatif dan kualitatif atas opini publik, dikenal sebagai informasi dan pengetahuan (IKM). Tujuan survei IKM adalah mengumpulkan data untuk pembuatan kebijakan di masa depan yang ditargetkan untuk meningkatkan standar pelayanan publik dengan menilai kinerja unit pelayanan secara berkala [2].

Penelitian ini menghadirkan kebaruan melalui kombinasi metode pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 dan instrumen E-Govqual untuk mengevaluasi pelayanan digital penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi SIMBG di Kabupaten Jember. Pendekatan ini memungkinkan penilaian yang lebih menyeluruh, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari sisi kualitas pelayanan elektronik (e-government). Selain mengidentifikasi variabel pelayanan yang masih lemah, penelitian ini juga menyusun rekomendasi berbasis metode brainstorming bersama tim teknis dinas terkait. Tujuan utama penelitian adalah menilai tingkat kepuasan masyarakat, mengidentifikasi variabel layanan yang dinilai kurang baik, dan menyusun strategi peningkatan pelayanan publik digital secara terukur dan aplikatif.

2. Metodologi

Populasi dan Sampel

Populasi

Istilah “populasi” mengacu pada semua subjek dan objek penelitian yang memiliki kualitas tertentu, termasuk benda. Untuk menentukan temuan akhir dari sebuah penelitian, populasi, secara teori, adalah semua anggota kelompok individu, hewan, peristiwa, atau objek yang hidup berdampingan di suatu lokasi secara terencana. [3]. Data Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Cipta Karya (Dinas PRKPCK) Kabupaten Jember menyebutkan pengajuan penerbitan PBG bangunan perumahan di Kabupaten Jember pada tahun 2023 adalah 13 orang.

Sampel

“Sampel adalah bagian dari populasi (sebagian atau wakil populasi yang diteliti),” menurut Arikunto (Akdon dan Hadi, 2005: 96). Sebagai sumber data, sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dapat digunakan untuk mewakili seluruh populasi. [4]. Penentuan sampel menggunakan sampel Morgan Krejcie, didapatkan 13 sampel sebagai responden.

Pengumpulan Data

Data Primer

Jawaban dari kuesioner yang disebarakan developer perumahan yang mengajukan penerbitan PBG melalui aplikasi SIMBG dijadikan sebagai data primer. Data yang dibutuhkan dalam kuesioner meliputi:

- a. Profil Responden
 1. Jenis Kelamin
 2. Usia
 3. Pendidikan

4. Pekerjaan
5. Jenis Layanan
- b. Pendapat Responden tentang Pelayanan (Permenpan RB No. 14 Tahun 2017) [5]
 1. Unsur 1 (U1): Persyaratan.
 2. Unsur 2 (U2): Sistem, informasi, dan prosedur.
 3. Unsur 3 (U3): Waktu penyelesaian.
 4. Unsur 4 (U4): Biaya/tarif dalam layanan tersebut.
 5. Unsur 5 (U5): Produk spesifikasi jenis pelayanan.
 6. Unsur 6 (U6): Kompetensi pelaksana.
 7. Unsur 7 (U7): Perilaku pelaksana.
 8. Unsur 8 (U8): Sarana dan prasarana.
 9. Unsur 9 (U9): Penanganan pengaduan, saran, dan masukan.
- c. Pendapat Responden tentang Pelayanan (*E-Govqual*) [6]
 1. Unsur 1 (U1): Struktur website.
 2. Unsur 2 (U2): URL yang mudah diingat.
 3. Unsur 3 (U3): Mengamankan pengarsipan data pribadi.
 4. Unsur 4 (U4): Kecepatan transaksi.
 5. Unsur 5 (U5): Akses internet terjangkau bagi masyarakat umum.
 6. Unsur 6 (U6): Format respon yang memadai.
 7. Unsur 7 (U7): Akurasi, keringkasan data dan informasi.
 8. Unsur 8 (U8): Informasi jelas dan mudah dimengerti.
 9. Unsur 9 (U9): Pertanyaan dijawab secara memadai.
 10. Unsur 10 (U10): Platform diskusi.

Data Sekunder

Data dari Dinas PRKPCK Kabupaten Jember, buku, dokumen laporan, dan peraturan yang relevan dijadikan data sekunder. Data yang dibutuhkan meliputi:

- a. Data masyarakat yang mengajukan penerbitan PBG melalui aplikasi SIMBG di Kabupaten Jember yang didapatkan dari Dinas PRKPCK Kabupaten Jember.
- b. PERMENPAN RB No. 14 Tahun 2017

Metode Analisis

Metode analisis pada penelitian ini meliputi beberapa tahap yaitu:

- a. Pengambilan data.
Metode pengambilan data menggunakan kuesioner tertutup dengan menggunakan skala Likert (1-4) yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Skala Likert

Skala Likert	
4	Sangat Baik
3	Baik
2	Kurang Baik
1	Tidak Baik

- b. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Perhitungan nilai IKM menggunakan pengukuran skala Likert yang diatur pada peraturan. Langkah – langkah pengolahan data menggunakan pengukuran skala Likert [7]:
 1. Menentukan bobot nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai persamaan 1.

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{x} = N \quad (1)$$

2. Menemukan nilai rata-rata untuk setiap elemen layanan dengan menjumlahkan semua nilai elemen layanan dan membaginya dengan jumlah total responden.
3. Dengan mengalikan nilai rata-rata per elemen layanan dengan poin 1, maka akan didapatkan nilai rata-rata tertimbang per elemen layanan.
4. IKM Unit Pelayanan didapatkan dari penjumlahan poin 1 dari sembilan (9) komponen. Agar penilaian IKM antara 25 dan 100 lebih mudah diinterpretasikan, maka penghitungan IKM dilakukan dengan mengkonversi ke nilai dasar 25 dengan menggunakan persamaan 2. Tabel penilaian IKM dapat dilihat Tabel 2.

SKM Unit Pelayanan x 25

2

Tabel 2. Penilaian IKM

Nilai Persepsi	Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)	Mutu Pelayanan (x)	Kinerja Unit Pelayanan (y)
1	1,000 - 2,5996	25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 - 3,064	65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 - 3,532	76,61 - 88,30	B	Baik
4	3,5324 - 4,00	88,31 - 100	A	Sangat Baik

- c. Variabel yang Mendapatkan Kategori Kurang Baik dan Tidak Baik
Variabel dengan kategori kurang baik, tidak baik dalam penerbitan PBG dapat diketahui dengan melihat Tabel 2, dan analisis perlakuannya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Analisis Perlakuan

Analisis Perlakuan	
Nilai IKM per Unsur	Kategori
A & B	Dipertahankan
C & D	Perlu Peningkatan

- d. Penentuan Rekomendasi dalam Pelayanan
Penentuan rekomendasi dan saran untuk peningkatan kualitas pelayanan penerbitan PBG digunakan metode *Brainstorming* yaitu dengan melakukan wawancara tatap muka kepada para ahli, yaitu staff ahli Dinas PRKPCK Kabupaten Jember.
Metode Brainstorming adalah jenis diskusi di mana para peserta didorong untuk berbagi pemikiran, perasaan, pengetahuan, pengalaman, dan gagasan mereka mengenai suatu subjek tanpa takut akan dampak dari peserta lain. [8].
Langkah-langkah Brainstorming adalah sebagai berikut [9]:

 1. Pembentukan tim dan penetapan kepala tim.
 2. Sosialisasi aturan *brainstorming*.
 3. Melontarkan permasalahan awal.
 4. Identifikasi permasalahan.
 5. Membuat ide dan tanggapan diberikan kepada setiap anggota.
 6. Mengumpulkan kertas dan dilakukan evaluasi

3. Hasil dan Pembahasan

Hasil Penelitian Kuesioner

Variabel pada kuesioner ini sesuai peraturan Menpan No. 14 Tahun 2017 dan Dimensi E-Govqual. Hasil penelitian kuesioner dapat dilihat pada Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 4. Hasil Kuesioner Permenpan No. 14 Tahun 2017

Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
1	4	3	4	4	4	3	4	4	4
2	3	3	3	3	3	4	4	4	3
3	3	4	4	3	4	4	3	4	4
4	4	3	3	4	3	3	3	4	4
5	4	4	4	3	3	4	3	3	4
6	4	4	4	4	4	3	4	4	4
7	2	3	3	4	4	3	3	3	2
8	3	4	2	3	2	3	4	4	3
9	2	3	4	2	3	4	2	4	3
10	4	2	3	3	4	4	4	3	2
11	2	3	4	2	3	3	3	3	4
12	2	3	3	4	3	2	4	4	3
13	3	4	3	3	4	4	3	2	2

Tabel 5. Hasil Kuesioner E-Govqual

Responden	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
1	3	3	4	3	2	3	3	4	3	3
2	2	2	3	2	3	4	3	2	4	4
3	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3
4	4	4	4	2	3	3	3	4	3	3
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3
7	3	2	3	3	2	3	4	3	4	3
8	4	3	2	3	3	4	3	4	2	4
9	4	3	4	4	3	4	3	3	2	4
10	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4
11	3	4	3	3	3	3	3	4	3	2
12	3	4	2	3	4	2	3	3	4	4
13	4	3	4	3	3	2	3	3	3	3

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Metode analisis untuk menentukan nilai IKM terhadap pelayanan penerbitan PBG melalui aplikasi SIMBG di Kabupaten Jember dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala Likert pada Tabel 2, hasilnya dapat dilihat pada Tabel 6 dan Tabel 7.

Tabel 6. Hasil Perhitungan Kuesioner Permenpan No. 14 Tahun 2017

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai per unsur	40	43	44	42	44	44	44	46	42
Nilai rata-rata per unsur	3,077	3,308	3,385	3,231	3,385	3,385	3,385	3,538	3,231
Nilai indeks per unsur	0,342	0,368	0,376	0,359	0,376	0,376	0,376	0,393	0,359
Kategori per unsur	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik
Indeks Kepuasan Masyarakat	83,11965812								
Kategori Penilaian Pelayanan	Baik								

Tabel 7. Hasil Perhitungan Kuesioner E-Govqual

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Jumlah Nilai per unsur	43	41	41	38	39	41	41	43	41

Nilai rata-rata per unsur	3,077	3,308	3,385	3,231	3,385	3,385	3,385	3,538	3,231
Nilai indeks per unsur	0,342	0,368	0,376	0,359	0,376	0,376	0,376	0,393	0,359
Nilai rata-rata per unsur	3,308	3,154	3,154	2,923	3,000	3,154	3,154	3,308	3,154
Indeks Kepuasan Masyarakat	79,03846154								
Kategori Penilaian Pelayanan	Baik								

Berdasarkan Tabel 2 dan dari hasil perhitungan Tabel 6 pada kuesioner Permenpan No. 14 Tahun 2017, didapatkan nilai IKM yaitu 83,12 dengan kategori Baik, dan dari hasil perhitungan Tabel 7 pada kuesioner E-Govqual, didapatkan nilai IKM yaitu 79,04 dengan kategori Baik.

Variabel yang Mendapatkan Kategori Kurang Baik dan Tidak Baik

Metode analisis untuk menentukan perlakuan variabel yang mendapatkan kategori kurang baik dan tidak baik dalam menggunakan tabel analisis perlakuan yang dapat dilihat pada Tabel 3. Dari hasil perhitungan pada Tabel 6 dan Tabel 7 didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 8 dan Tabel 9.

Tabel 8. Analisis Perlakuan Kuesioner Permenpan No. 14 Tahun 2017

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
Nilai rata-rata per unsur	3,077	3,308	3,385	3,231	3,385	3,385	3,385	3,538	3,231
Kategori per unsur	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Sangat Baik	Baik

Tabel 9. Analisis Perlakuan Kuesioner *E-Govqual*

	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10
Nilai rata-rata per unsur	3,308	3,154	3,154	2,923	3,000	3,154	3,154	3,308	3,154	3,308
Kategori per unsur	Baik	Baik	Baik	Kurang Baik	Kurang Baik	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Dari hasil analisis perlakuan pada Tabel 8 pada kuesioner Permenpan No. 14 Tahun 2017 diperoleh hasil bahwa U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7, U9 memperoleh kategori Baik, dan U8 mendapatkan kategori Sangat Baik, berdasarkan Tabel 2 maka disimpulkan semua unsur pada kuesioner ini perlu dipertahankan.

Dari hasil analisis perlakuan pada Tabel 9 pada kuesioner E-Govqual diperoleh hasil bahwa U1, U2, U3, U6, U7, U8, U9, U10 memperoleh kategori Baik dan perlu dipertahankan, sedangkan U4, U5 mendapatkan kategori Kurang Baik dan perlu peningkatan..

Penentuan Rekomendasi dalam Pelayanan

Dari hasil Brainstorming kepada Ketua dan Anggota Tim Teknis PBG dan SLF Dinas PRKPCK Kabupaten Jember, maka rekomendasi yang diberikan kepada Dinas PRKPCK Kabupaten Jember untuk meningkatkan kualitas pelayanan penerbitan PBG melalui aplikasi SIMBG di Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur teknologi, terutama yang berkaitan dengan server dan jaringan, sehingga kualitas web SIMBG dapat lebih baik dan lancar.
2. Meningkatkan kualitas petugas pelayanan terutama yang mengelola peningkatan inovasi server dan jaringan melalui berbagai pelatihan sehingga dapat lebih tanggap dalam memberikan pelayanan.
3. Melakukan sosialisasi kepada jasa konstruksi atau developer perumahan terkait pentingnya pengajuan PBG melalui aplikasi SIMBG, sehingga lebih paham mengenai PBG dan SIMBG.

4. Perlu disusun strategi yang komprehensif melalui FGD dengan berbagai instansi dan masyarakat agar diperoleh layanan yang paling tepat dengan kebutuhan masyarakat dan regulasi yang ada [10].

4. Kesimpulan

Penelitian ini mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) di Kabupaten Jember dengan menggunakan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) berdasarkan Permenpan No. 14 Tahun 2017 dan dimensi E-Govqual. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa secara umum pelayanan penerbitan PBG melalui SIMBG dinilai dalam kategori “Baik”, dengan nilai IKM sebesar 83,12 berdasarkan instrumen Permenpan dan 79,04 berdasarkan instrumen E-Govqual. Tidak ditemukan variabel yang masuk dalam kategori “Kurang Baik” atau “Tidak Baik” pada instrumen Permenpan, namun pada instrumen E-Govqual ditemukan dua variabel yang masih dinilai kurang, yaitu U4 (kecepatan transaksi) dan U5 (akses internet yang terjangkau bagi masyarakat umum). Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum layanan sudah memadai, terdapat aspek teknis dalam pelayanan digital yang masih menjadi tantangan dan memerlukan peningkatan nyata.

Untuk mengatasi hal tersebut, rekomendasi strategis disusun melalui metode brainstorming dengan tim teknis dari Dinas PRKPCK Kabupaten Jember, yang mencakup: (1) peningkatan infrastruktur teknologi, khususnya server dan jaringan pendukung aplikasi SIMBG, agar lebih stabil dan cepat; (2) peningkatan kompetensi petugas pelayanan, terutama yang terlibat dalam pengelolaan sistem digital melalui pelatihan teknis dan penguatan SDM; dan (3) sosialisasi yang lebih luas dan intensif kepada pelaku jasa konstruksi dan masyarakat umum mengenai pentingnya pengajuan PBG melalui SIMBG untuk meningkatkan pemahaman, legalitas pembangunan, dan kepatuhan terhadap regulasi. Rekomendasi ini juga menyarankan dilakukannya FGD lintas pemangku kepentingan sebagai bagian dari penyusunan strategi kebijakan berbasis kebutuhan masyarakat dan tuntutan transformasi layanan publik berbasis digital.

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sistem layanan digital seperti SIMBG dapat meningkatkan efisiensi administrasi dalam perizinan bangunan, namun tetap memerlukan pembenahan dari aspek teknis dan sumber daya manusia untuk menciptakan pelayanan yang responsif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini juga memberikan kontribusi penting sebagai dasar bagi pengambilan kebijakan daerah dalam meningkatkan kualitas layanan publik khususnya di bidang perizinan bangunan, serta sebagai acuan evaluatif untuk penerapan sistem layanan digital lainnya di tingkat lokal maupun nasional.

Acknowledgment

-.

Daftar Pustaka

- [1] D. Fahamsyah, C. I. Hatta, and Mahyuliansyah, “Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IkM) Pelayanan Kesehatan Di Puskesmas Kabupaten Hulu Sungai Utara,” *J. Adm. Kesehat. Indones.*, vol. 6, no. 2, p. 189, 2018, doi: 10.20473/jaki.v6i2.2018.189-196.
- [2] Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Situbondo, “Indeks Kepuasan Masyarakat,” Situbondo, 2020.
- [3] I. M. D. M. Adnyana, “Populasi dan Sampel,” *Metod. Penelit. Pendekatan Kuantitatif*, vol. 14, no. 1, pp. 103–116, 2021.
- [4] R. S. Aryani, “Studi Deskriptif Kinerja di Masing-masing bagian di Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan,” *Univ. Pendidik. Indones.*, pp. 41–65, 2013, [Online]. Available: perpustakaan.upi.edu

- [5] Pemerintah, Permenpan No 14 Tahun 2017. 2017. doi: 10.1016/0014-4827(75)90518-2.
- [6] R. Puspitasari, "Kualitas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung Kabupaten Banyuwangi," Repository.Unej.Ac.Id, 2022, [Online]. Available: <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/110228>
- [7] Puskesmas Tarok, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Puskesmas Tarok Tahun 2021. 2021.
- [8] Y. Yusuf and A. Trisiana, "Metode Braistorming Tertulis: Teknik Curah Pendapat Dengan Memaksimalkan Keterlibatan Semua Peserta Dalam Pengambilan Keputusan," Adi Widya J. Pengabdi. Masy., vol. 3, no. 2, p. 108, 2019, doi: 10.33061/awpm.v3i2.3365.
- [9] M. Matondang, N. Sary, T. B. Gultom, and Y. Sebayang, "Penerapan Metode Brainstorming dalam Perancangan Produk Pochade," Talent. Conf. Ser. Energy Eng., vol. 3, no. 2, pp. 743–747, 2020, doi: 10.32734/ee.v3i2.1071.
- [10] Sariwulan, R., Soetjipto, J. W., & Hidayah, E. (2024, December). Improvement building permit service based on quality function deployment. In AIP Conference Proceedings (Vol. 3043, No. 1). AIP Publishing.